

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bencana banjir lahar dingin (*galodo*) Gunung Marapi yang terjadi pada tahun 2024 mengakibatkan kerusakan parah pada permukiman dan berbagai prasarana vital di Kabupaten Agam, khususnya di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Candung. Kajian kerentanan wilayah menunjukkan Kabupaten Agam sebagai salah satu zona dengan tingkat bahaya tertinggi akibat aliran material vulkanik Marapi yang sering memicu banjir lahar dingin (Augia et al., 2024). Peristiwa tahun 2024 memperlihatkan dampak besar pada rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum (Eka Putri & Ikhwan, 2024). Data dari dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Agam mencatat bahwa di Nagari Bukit Batabuah, setidaknya 49 unit rumah warga mengalami kerusakan, 6 unit jembatan putus, 800 meter jalan usaha tani rusak, serta jaringan irigasi dan drainase mengalami kerusakan signifikan yang mengganggu aktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat. Dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana merupakan kepastian yang harus segera dan tepat dilaksanakan.

Setelah fase tanggap darurat, pemerintah melaksanakan rekonstruksi untuk memulihkan permukiman, layanan dasar, dan infrastruktur. Kerangka Sendai menegaskan prinsip *Build Back Better* sebagai dasar rekonstruksi agar masyarakat lebih tahan terhadap bencana di masa mendatang (Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015). Di tingkat nasional, standar pelaksanaan tersebut diatur secara formal melalui Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang menekankan bahwa pembangunan kembali harus menghasilkan kondisi yang lebih aman dan berkualitas dibandingkan dengan kondisi sebelum kejadian bencana.

Namun, keberhasilan rekonstruksi sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar teknis bangunan aman bencana serta kualitas koordinasi antarinstansi. Di lapangan, sering kali ditemukan kesenjangan antara rencana aksi dengan realisasi fisik, yang jika tidak dievaluasi secara ketat, berisiko menyebabkan pembengkakan biaya, keterlambatan, hingga ketidakpuasan masyarakat penerima manfaat. Evaluasi kebijakan sangat diperlukan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas program pemerintah dan memastikan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya publik.

Penelitian ini penting karena hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan rekonstruksi pascabencana, khususnya di daerah rawan banjir lahar dingin. Kajian evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan instrumen evaluasi yang jelas untuk menilai efektivitas program pemerintah (Dunn, 2018). Penelitian ini memperkuat literatur mengenai implementasi standar nasional rekonstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017, yang menekankan bahwa upaya pembangunan kembali harus menghasilkan kondisi yang lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya guna mengurangi risiko bencana di masa depan. Studi lain menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pedoman ini bergantung pada tata kelola pemerintahan daerah yang responsif serta kualitas koordinasi antarinstansi.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1. Tujuan

Berikut adalah tujuan dari tugas akhir ini:

1. Mengidentifikasi pelaksanaan teknis dan nonteknis rekonstruksi pascabencana Galodo Gunung Marapi, Kabupaten Agam.
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan rekonstruksi di lapangan dengan standar yang diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017.
3. Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana galodo Gunung Marapi di Kabupaten Agam.

1.2.2. Manfaat Penelitian

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan rekonstruksi pascabencana di wilayah rawan bencana. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana upaya rekonstruksi yang telah dilakukan mampu memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan rasa aman terhadap ancaman bencana di masa mendatang.

1.3. BATASAN MASALAH

Ruang lingkup permasalahan dalam tugas akhir ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Wilayah kajian dibatasi hanya pada lokasi terdampak di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

2. Kajian difokuskan sepenuhnya pada evaluasi pelaksanaan rekonstruksi fisik berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
3. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan analisis tematik.
4. Subjek penelitian dibatasi pada lembaga pelaksana program (BPBD, Pemerintah Nagari) dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari program rekonstruksi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, tujuan dan manfaat, batasan masalah serta sistematika penulisan tugas akhir yang dilakukan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori dasar yang berhubungan dengan objek penelitian tugas akhir yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir yang dibuat dalam bentuk diagram alir serta menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan tugas akhir yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil yang didapat dari penelitian dan analisis dari hasil yang didapatkan, yang digambarkan dalam bentuk gambar, grafik dan tabel.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan serta saran dari pengerjaan penelitian tugas akhir yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN